



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Implementasi Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Partai Golkar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kota Pekanbaru”**

Kesetaraan hak berpolitik antara laki-laki dan perempuan terlihat masih belum sejajar didalam kepengurusan Partai Politik. Kecilnya angka keterwakilan perempuan didalam sebuah Partai Politik. Padahal telah dibentuk Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang mengaruskan 30% keterwakilan perempuan didalam sebuah kepengurusan Partai Politik. Seharusnya hal ini menjadi peluang bagi perempuan untuk menunjukkan partisipasinya ke public untuk mencapai peran politiknya. Pada kenyataannya hingga saat ini perempuan kurang memberikan peran yang signifikan untuk kaumnya sendiri.

Adapun yang menjadi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan keterwakilan perempuan didalam sebuah kepengurusan Partai Politik yaitu Partai Golongan Karya (GOLKAR) di Kota Pekanbaru. Dan bagaimana pelaksanaan keterwakilan calon legislatif perempuan pada Partai Golkar berdasarkan Undang-undang No 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *penelitian hukum sosiologis*. Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar di JL.Datuk setia maharaja No.11 Tengkereng Selatan, Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Dengan subjek penelitian anggota kepengurusan perempuan di Partai Golkar di Kota Pekanbaru dengan jumlah Sampel sebanyak 8 orang. Data yang digunakan merupakan data primer, data sekunder dan data tersier dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Metode yang digunakan dalam pengolahan data adalah *metode deduktif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan didalam kepengurusan Partai Golkar di Kota Pekanbaru sudah efektif, tetapi pada 2 periode setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Partai Golkar mengalami sedikit kendala dalam pemenuhan keterwakilan perempuan dalam kepengurusannya. Bawaslu telah menentukan akibat hukum apabila tidak mencapainya kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam calon legislative (bacaleg) yaitu akan tercoret dan tidak ada keterwakilan untuk daerah pilihan (dapil) yang tidak bisa memenuhi keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan pada daftar calon sementara anggota DPRD Partai Golkar pada pemilihan umum tahun 2019 yang terbagi menjadi 8 daerah pilihan yang tiap daerah memiliki jumlah keterwakilan perempuan yang telah mencapai angka yang ditentukan oleh Undang-undang No 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.